

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan telah menjadi topik yang dibahas dan diperdebatkan di berbagai forum nasional maupun internasional, walaupun kemiskinan sudah muncul sejak ratusan tahun yang lalu. Fakta menunjukkan pembangunan yang telah dilakukan belum mampu meredam jumlah penduduk miskin di dunia, khususnya negara-negara berkembang. Seseorang dikatakan miskin ketika ada individu atau kelompok orang yang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal standar hidup tertentu.

Badan Pusat Statistik (BPS, 2013) menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi standar minimum kebutuhan, baik kebutuhan makanan maupun pangan. Kemiskinan ditunjukkan oleh keadaan seseorang yang hanya sanggup mencukupi kebutuhan makannya kurang dari 2100 kalori perkapita perhari. Di negara berkembang seperti Indonesia, masih banyak penduduk yang tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka secara maksimal. Hal itu disebabkan pendapatan yang mereka miliki tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan, atau bisa juga karena mereka tidak mempunyai penghasilan untuk membelanjakan kebutuhan mereka. Masalah kemiskinan yang dialami masyarakat Indonesia juga menjadi masalah sosial yang selalu relevan untuk dikaji berkesinambung. Tidak hanya karena persoalan kemiskinan sudah ada sejak lama, tetapi hingga kini belum masalah kemiskinan belum bisa diselesaikan. Bahkan kini gejalanya makin naik seiring dengan berbagai krisis yang masih dihadapi bangsa Indonesia.

Secara nasional angka kemiskinan Indonesia terus menurun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan terus mengalami penurunan sejak periode 2002. Namun pada 2006, persentase penduduk miskin tercatat 17,75% lebih tinggi dari Maret 2005 yang sebesar 15,97%. Kemudian pada tahun 2015 penduduk miskin naik 0,17% dari tahun 2014 dengan jumlah 10,96% pada september 2014. Hal itu terjadi karena kenaikan laju inflasi, harga-harga kebutuhan pokok, dan menurunnya upah buruh. Penurunan angka kemiskinan tersebut tidak luput dari upaya-upaya pemerintah yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam mengatasi kemiskinan, melalui berbagai program-program pemberdayaan masyarakat yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. Ketidakstabilan harga kebutuhan pokok juga harus menjadi perhatian pemerintah sehingga tidak terjadi inflasi yang merugikan masyarakat miskin dan masyarakat lain yang tergolong tidak miskin dengan penghasilan disekitar garis kemiskinan akan bergeser posisi jadi masyarakat miskin

Permasalahan tentang kemiskinan tidak hanya menjadi masalah nasional, tetapi merambah ke setiap daerah di semua wilayah Indonesia. Salah satu daerah di Indonesia yang penduduk miskinnya masih cukup tinggi adalah Gorontalo. Persentase penduduk miskin di Gorontalo mengalami fluktuasi dilihat dari tahun 2016-2020.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin
Tahun 2016-2020

Kabupaten / Kota	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Kabupaten Boalemo	21.67%	21.85%	20.33%	18.87%	18.57%
Kabupaten Gorontalo	21.80%	20.55%	19.84%	18.06%	17.56%
Kabupaten Pohuwato	22.43%	21.27%	19.40%	18.16%	17.62%
Kabupaten Bone Bolango	18.49%	17.81%	17.40%	16.12%	15.81%
Kabupaten Gorontalo Utara	18.93%	19.23%	18.54%	16.95%	16.88%
Kota Gorontalo	6.05%	5.57%	5.57%	5.45%	5.59%

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo tahun 2010-2020

Masalah tentang kemiskinan selalu diutamakan oleh pemerintah untuk segera diatasi demi meningkatkan pembangunan. Tingkat pendidikan dan jumlah pendapatan menjadi faktor penting dalam mengatasi kemiskinan. Dengan meningkatkan pendidikan, maka kualitas SDM akan meningkat. Oleh karena tingkat pendidikan dapat membantu meningkatkan pendapatan. Semakin tinggi pendidikan yang diraih, maka pekerjaan dengan penghasilan yang lebih tinggi dapat dicapai. Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya untuk membantu masyarakat memperbaiki kualitas sumber daya manusianya melalui pendidikan, termasuk di Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dari total 49.623 murid SMP sederajat di sekolah swasta atau negeri di Gorontalo, tercatat 368 orang yang diantaranya memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Total 50.831 dari murid SMA sederajat 500 orang diantaranya memilih tidak melanjutkan sekolah. Karena

itulah pemerintah menyatakan mutu pendidikan di Provinsi Gorontalo harus cepat diperbaiki, agar SDM Gorontalo bisa bersaing dengan memperbaiki kualitas pendidikan sehingga anak yang memilih berhenti sekolah menjadi berkurang.

Tingkat pendidikan bisa digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk. Salah satu keadaan yang mempengaruhi kemiskinan adalah kualitas SDM yang rendah, yang terjadi karena tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan menjadi kebutuhan bagi semua orang, karena seseorang yang memiliki pendidikan dapat membebaskan diri dari belenggu kemiskinan. Karena semakin meningkatnya tingkat pendidikan seseorang, maka kualitas sumber daya manusianya akan semakin baik. Sehingga pendidikan menjadi faktor terpenting dalam mengatasi kemiskinan.

Pendidikan merupakan cara untuk meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia). Kualitas SDM sangat berpengaruh terhadap pembangunan, karena manusia adalah pelaku dan tujuan pembangunan, juga merupakan sasaran pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan SDM yang berkualitas merupakan bagian dari pembangunan yang sangat penting. Cara mengukur kualitas SDM menggunakan IPM. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan, karena IPM mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. Meningkatnya nilai IPM menunjukkan bahwa terjadi peningkatan SDM yang berkualitas pada suatu daerah. Untuk menghasilkan SDM yang berkualitas, membutuhkan berbagai media dan usaha. Oleh karena itu investasi dibutuhkan untuk menciptakan pembentukan SDM yang berkualitas, seperti investasi dibidang pendidikan dan kesehatan. Pendidikan

menjadi kebutuhan paling pokok bagi setiap orang, karena masyarakat yang memiliki pendidikan sekiranya bisa mendapatkan kemampuan untuk melepaskan diri dari kemiskinan.

Hubungan antara pendidikan dan kemiskinan cukup besar, karena pendidikan memiliki kemampuan untuk seseorang agar dapat berkembang melalui kesanggupan menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan dalam penelitian ini dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Rata-rata Lama Sekolah.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa yang usianya terkait dengan jenjang pendidikan dari jumlah penduduk yang usianya sama dengan jenjang pendidikan tersebut. APM memperlihatkan partisipasi sekolah masyarakat di usia sekolah pada tingkat pendidikan tertentu, yang menjadi bukti daya serap penduduk yang berada diusia sekolah pada tiap jenjang pendidikan. Dengan menggunakan APM kita bisa melihat angka partisipasi penduduk pada usia sekolah yang sesuai dengan standar jenjang pendidikan di sekolah tersebut.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah penduduk pada usia sekolah yang masih bersekolah tanpa melihat jenjang pendidikan apa yang ditempuh terhadap penduduk pada usia sekolah yang bersangkutan. Makin tinggi APS di suatu daerah menunjukkan adanya peluang yang lebih besar dalam mendapatkan pendidikan secara umum.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut Badan Pusat Statistik adalah banyaknya tahun yang dilalui masyarakat dalam mengikuti pendidikan formal. Penduduk

yang telah tamat Sekolah Dasar dihitung dari lama bersekolah yaitu 6 tahun, tamat Sekolah Menengah Pertama dihitung 9 tahun, tamat Sekolah Menengah Atas dihitung 12 tahun tanpa melihat apakah pernah tertinggal kelas atau tidak. RLS dimanfaatkan untuk melihat kualitas penduduk berdasarkan pendidikan formal yang diselesaikan. Semakin meningkatnya pendidikan seseorang, akan semakin luas wawasan dan dapat meningkatkan keahlian yang bisa menjadi dorongan meningkatkan produktivitas seseorang.

Tingkat pendidikan dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan kualitas SDM yang meningkat. Apabila tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin tinggi, akan menunjukkan kualitas penduduk yang semakin baik. Dengan ditetapkan program wajib belajar sembilan tahun oleh pemerintah yang begitu penting terhadap kehidupan bangsa, sebab program itu berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan. Dapat dilihat dari tabel 1.2 menunjukkan berhasil atau tidaknya program wajib belajar 9 tahun yang dilihat dari jumlah APM, APS, dan RLS, seperti berikut ini:

Table 1.2
Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP, Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2016-2020

Kabupaten / Kota	Tahun	APM (Persen)	APS (Persen)	RLS (Tahun)
Kabupaten Boalemo	2016	65.89%	86.85%	6.3
	2017	64.69%	88.39%	6.38
	2018	67.29%	87.95%	6.53
	2019	67.96%	88.07%	6.54
	2020	67.86%	87.94%	6.82

Kabupaten / Kota	Tahun	APM (Persen)	APS (Persen)	RLS (Tahun)
Kabupaten Gorontalo	2016	65.27%	90.33%	6.64
	2017	66.66%	90.70%	6.81
	2018	63.31%	90.12%	6.83
	2019	64.72%	90.58%	7.11
	2020	65.59%	90.39%	7.13
Kabupaten Pohuwato	2016	74.38%	90.61%	6.67
	2017	73.59%	89.30%	6.84
	2018	70.13%	89.98%	6.85
	2019	71.56%	91.05%	7.1
	2020	72.10%	90.75%	7.12
Kabupaten Bone Bolango	2016	71.13%	92.12%	7.81
	2017	74.09%	91.72%	7.84
	2018	74.91%	93.54%	8.04
	2019	75.73%	93.01%	8.07
	2020	75.82%	94.29%	8.31
Kabupaten Gorontalo Utara	2016	77.86%	91.17%	6.62
	2017	76.06%	93.04%	6.68
	2018	80.56%	92.86%	6.72
	2019	80.97%	94.04%	6.74
	2020	81.16%	93.64%	7.03
Kota Gorontalo	2016	65.86%	96.34%	10.29
	2017	66.91%	95.54%	10.32
	2018	71.64%	95.74%	10.34
	2019	72.03%	96.31%	10.35
	2020	73.79%	96.41%	10.36

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo tahun 2010-2020

Pada tingkat pendidikan ini yang paling berpengaruh adalah Rata-rata lama sekolah. Dengan melihat RLS, kita dapat mengetahui berapa lama anak bersekolah pada jenjang tingkat pendidikan. Berdasarkan data diatas, RLS pada tingkat SMP sederajat tahun 2019 adalah 7.69 tahun. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anak bersekolah pada jenjang smp hanya sampai kelas 2. Permasalahan putus sekolah sangat berpengaruh terhadap pembangunan kualitas SDM, sebab tuntutan penyediaan SDM terhadap pembangunan berkisar pada sumber daya yang memiliki ilmu pengetahuan,

keterampilan dan teknologi yang tinggi. Berkenaan dengan rendahnya lulusan SMP dapat berpengaruh terhadap kualitas SDM yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Gorontalo, salah satunya dengan menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun. Namun untuk mencapai hasil yang baik, bukan hanya dari usaha pemerintah, melainkan dengan peran dari semua pihak.

Pentingnya pendidikan perlu ditanamkan sejak dini, sehingga anak-anak memiliki kemauan untuk bersekolah dan tidak menjadi buta huruf. Pada zaman modern ini, sebagian besar pekerjaan membutuhkan pendidikan atau minimal mengenal huruf dan angka sehingga bisa membaca atau menghitung sederhana. Dengan dukungan dan dorongan yang diberikan orang tua akan membantu dalam proses pendidikan, sehingga anak lebih percaya diri dan menciptakan prestasi dalam bersekolah. Selain itu, anak juga menjadi investasi orang tua dimasa depan dengan meningkatnya pendidikan anak. Pendidikan dapat menjadikan seseorang lebih kompeten dan memiliki kemampuan yang diperlukan dalam dunia kerja ataupun ke perguruan tinggi.

Sejalan dengan pendidikan, kesehatan merupakan investasi yang mempunyai peran penting saat mendukung pembangunan ekonomi dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Program unggulan Pemerintah Provinsi Gorontalo salah satunya yaitu meningkatkan layanan kesehatan. Dilihat dari pelayanan kesehatan Provinsi Gorontalo khususnya wilayah pedesaan masih relatif rendah. Masalah pelayanan kesehatan belum bisa teratais, terutama pada

tingkat masyarakat miskin. Dengan kondisi inilah yang melatarbelakangi pemerintah melakukan perkembangan dalam pelayanan jaminan kesehatan.

Kemiskinan dan kesehatan memiliki mata rantai yang terhubung satu sama lain. Umumnya, mereka yang kehidupannya terletak dibawah garis kemiskinan rentan terkena penyakit. Hal itu disebabkan karena gaya hidup yang tidak baik, hingga kesulitan mendapatkan makanan yang memiliki kualitas dan bergizi tinggi. Sedangkan bagi masyarakat yang memiliki tingkat kesehatan yang baik, dapat memperendah angka kemiskinan. Kekurangan makanan sehat yang bergizi dan memiliki penyakit dapat mempengaruhi kehidupan anak seperti membaca, menulis, berhitung, dan berpikiran logis, namun di masa depan hal itu juga dapat memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap kesempatan memperoleh pekerjaan atau melakukan pekerjaan dan membuat berkurangnya produktifitas dalam beraktifitas terutama bekerja. Karena orang sehat bisa lebih produktif, biaya untuk berobat bisa disubtitusikan untuk kebutuhan lain misalnya untuk membeli kebutuhan pokok, cara hidup menjadi lebih positif, usia hidup lebih tinggi, dan tingkat kematian lebih rendah.

Indikator kesehatan salah satunya ditunjukkan dengan Angka Harapan Hidup (AHH). Angka harapan hidup pada umumnya digunakan sebagai cara untuk menilai kinerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, khususnya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat, sangat penting apabila melihat Angka Harapan Hidup. Semakin tinggi angka harapan hidup, maka semakin menunjukan derajat kesehatan yang meningkat. Di negara-negara yang memiliki tingkat kesehatan

lebih baik, rata-rata memiliki hidup yang lebih lama. Dengan demikian dapat memiliki peluang untuk menempuh pendidikan, bekerja dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Data angka harapan hidup ditunjukkan dengan tabel 1.4 dibawah ini:

Tabel 1.3
Angka Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Gorontalo
Tahun 2016-2020

Kabupaten / Kota	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Kabupaten Boalemo	67.44	67.8	68.19	68.77	69.03
Kabupaten Gorontalo	67.25	67.21	66.98	67.4	67.49
Kabupaten Pohuwato	62.38	62.81	63.19	63.77	64.02
Kabupaten Bone Bolango	67.55	67.69	67.93	68.32	68.38
Kabupaten Gorontalo Utara	64.93	65.07	65.31	65.74	65.83
Kota Gorontalo	71.64	71.73	71.96	72.37	72.45

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo tahun 2010-2020.

Angka Harapan Hidup (AHH) yang rendah di daerah tertentu menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan belum berhasil. Semakin tinggi AHH, menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan yang terletak pada suatu daerah. Angka Harapan Hidup (AHH) yang rendah harus dilakukan sejalan dengan program peningkatan kesehatan dan program sosial lainnya, misalnya program pemberantasan kemiskinan. Menurut Paul Hoffman dalam Rismawati (2018) setiap orang bisa mengetahui suatu negara yang masih terbelakang ketika melihatnya. Negara yang ditandai oleh kemiskinan, apabila jarang memiliki industri, dipadati oleh pengemis, rumah sakit dan lembaga pendidikan tinggi

sangat sedikit, pemerintah belum dapat memberikan pelayanan yang memadai, sebagian besar penduduk buta huruf.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo?
2. Seberapa besar pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo?
3. Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesehatan terhadap kemiskinn di Provinsi Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai kemiskinan yang berkaitan dengan tingkat pendidikan dan

kesehatan, serta diharapkan juga dapat menjadi bahan informasi dan referensi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang dipelajari secara teoritis di bangku perkuliahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai wahana latihan menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan. Sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

c. Bagi Pembaca dan Masyarakat Umum

Hasil dari penelitian ini semoga dapat bermanfaat sebagai sumber informasi data sekunder bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan bagi masyarakat tentang bagaimana pengaruh pendidikan dalam mencari pekerjaan sehingga menghasikan pendapatan yang dapat mengurangi kemiskinan di Gorontalo. Juga bisa menjadi rujukan penelitian yang relevan selanjutnya.